

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Berlakunya Undang-undang No 27 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun administrasi pengelolaan keuangan, kondisi seperti ini dikenal dengan sebutan era otonomi daerah.

Dalam era ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang berdsMBER dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan permainan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Dengan disahkannya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang susunan organisasi tata perngkat daerah Kabupaten Kampar, maka Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Dinas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

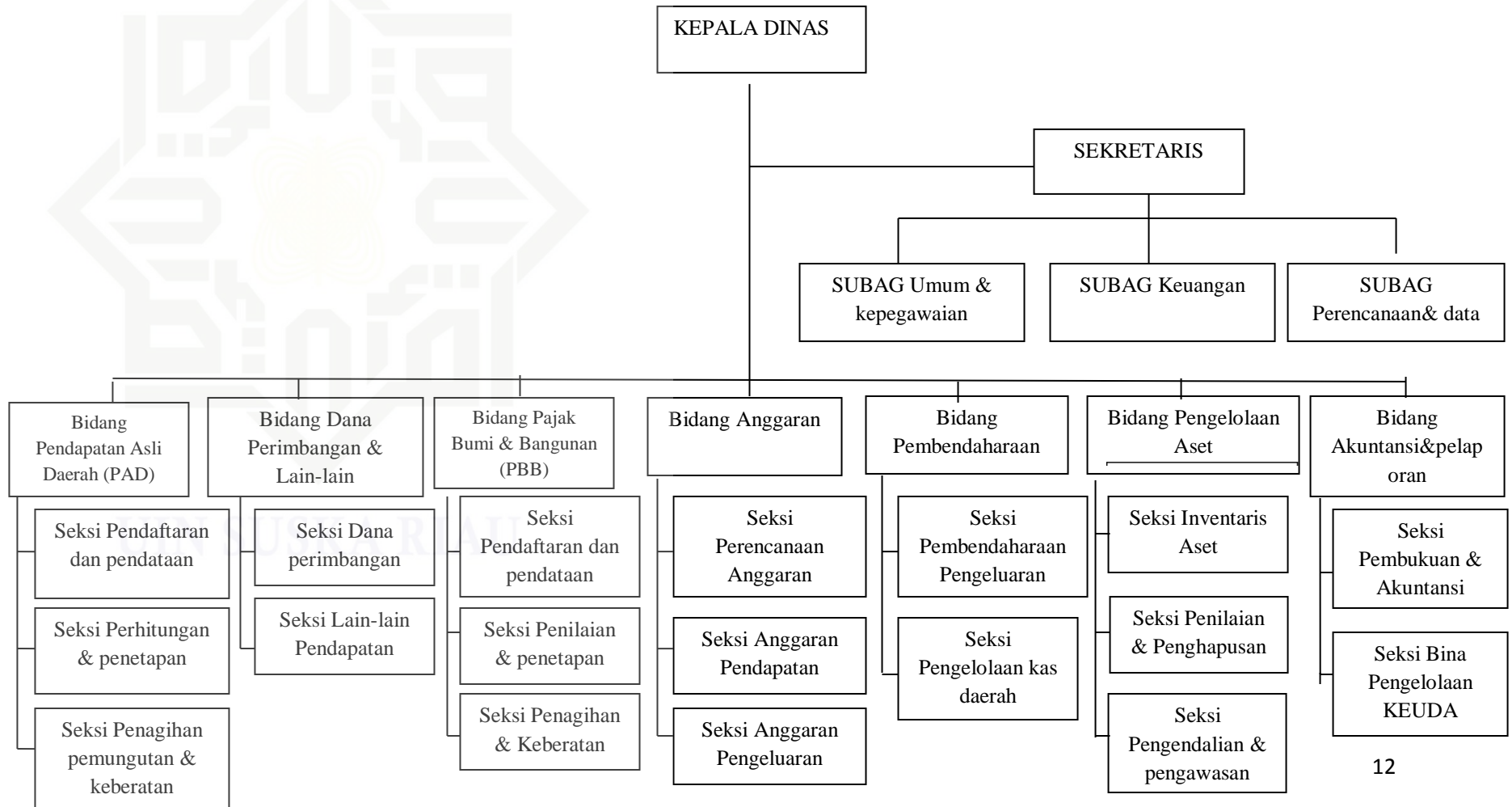
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Kampar, seiring dengan perubahan nama, maka dengan berpedoman Peraturan Bupati Kampar No.55 Tahun 2012 tentang tugas dan jabatan struktural di lingkungan Dinas di Kabupaten Kampar yang juga merubah beberapa tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sejalan dengan perubahan kewenangan dan penambahan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi. Target dan sasaran SKSD, maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber khususnya akstentifikasi sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya dan ditambah dengan meningkatnya profesional Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang optimal, profesional, dan akuntabel semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah sehingga DPPKA harus lebih berbenah dari tugas pokok dan fungsi yang diemban.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

GAMBAR II.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Visi dan Misi

Visi

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diberisikan cita-cita yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif.

Mengacu pada konsepsi visi diatas dan mengacu kepada visi pembangunan Kabupaten Kampar, maka dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah perlu menetapkan visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada. Dan selaras dengan visi induk organisasinya, yaitu:

“Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah yang optimal dan profesional serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional tahun 2017”

Pernyataan visi di atas memuat kata-kata kunci, yaitu peningkatan penerimaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset yang profesional. Kapasitas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatan daerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang optimal dan mampu mengelola keuangan dan aset secara profesional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Optimal mengandung makna perpaduan yang seimbang antara efektifitas dan efisiensi. Sehingga penerimaan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan jumlah yang sesuai dengan potensinya dan diperoleh dengan biaya yang efisien. Penerimaan pendapatan yang besar hanya akan sedikit memberikan nilai tambah jika diperoleh dengan biaya yang besar pula.

Selanjutnya eksistensi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dapat dipertahankan apabila masih ada kepercayaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar beserta seluruh aparaturnya harus memiliki integritas profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, penetapan, pemungutan, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan penggunaan sistem informasi teknologi informasi.

Misi

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Dinas Pendapatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/ Pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, yaitu melalui tiga misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas.

Misi Kedua : Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sesuai dengan ketentuan.

A. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas

Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar harus secara optimal meningkatkan tata kelola dan kelembagaan. Dengan didukung SDM berkualitas dan sarana dan prasarana yang memadai maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SDM merupakan faktor kedua kunci sukses (Key Success) dalam optimalisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Potensi pendapatan daerah yang besar tidak akan mampu dioptimalkan bila SDM tidak mampu mengelola pendapatan daerah dengan baik, begitu juga dengan pengelolaan keuangan dan aset, tanpa SDM yang baik akan menimbulkan potensi-potensi yang akan merugikan keuangan daerah.

SDM yang memiliki kapasitas dalam mengelola pendapatan, keuangan dan aset mempunyai makna bahwa SDM harus disiplin melaksanakan tugas dan berorientasi kepada pencapaian hasil, serta memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban tugas. Kapabilitas merupakan hal yang sangat penting, mengingat tuntutan lingkungan yang semakin tinggi, perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, sehingga harus siap menambah wawasan dan kemampuan teknisnya. Kemampuan itupun perlu didukung dengan disiplin, kemampuan perencanaan yang baik, taat kepada penjadwalan tugas yang telah diatur dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kepada mutu hasil pekerjaannya.

B. Misi Kedua : Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah

Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan atau transfer, dan lain-lain pendapatan. Pembangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar untuk mensejahterakan masyarakat Kampar untuk mensejahterakan masyarakat Kampar sangat tergantung dari besar kecilnya pendapatan daerah. Sebagai salah satu komponen dalam pendapatan daerah, sejauh ini kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil, bahkan belum dapat menutup defisit anggaran. Oleh karena itu, salah satu upaya strategis daam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar adalah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Untuk itu, pembinaan dan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sosialisasi dan propoganda lainnya mengenai arti penting pajak daerah dan retribusi daerah akan selalu dikembangkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

C. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan keuangan daerah sangat tergantung pada kemampuan SDM, serta sarana dan prasarana, mulai dari tahap perencanaan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan, monitoring yang bermuara pada data dan informasi yang akurat dan akuntabel.

Dari hal di atas pengelolaan keuangan dan aset akan ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga setiap tahap dalam pengelolaan keuangan dan aset akan lebih efektif dan efisien.

2.4 Uraian Tugas/Bagian Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Adapun masing-masing seksi adalah:

1. Kepala Dinas

- a. Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang daerah dibidang pendapatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

2. Sekretariat

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan menatausahakan kegiatan lainnya.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan program, umum, urusan keuangan dan kepegawaian.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menyimpan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, serta surat-menyurat dan kearsipan.
- b) Menyimpan bahan penyusun perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

2) Sub Bagian Keuangan

- a) Membantu sekretaris dalam penyusunan rancangan anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
- b) Menyimpan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja.

3) Sub Bagian Perencanaan

- a) Membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.
- b) Menyiapkan bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan satuan kerja.

3. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- a. Melakukan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang pendapatan asli daerah.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi perhitungan pelayanan pendaftaran dan pendapatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi perhitungan penetapan pemungutan dan keberatan.

1) Seksi pendapatan dan pendataan:

Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pelayanan pendaftaran pendataan.

2) Seksi perhitungan dan penetapan:

Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan dan penagihan.

3) Seksi pemungutan dan keberatan:

Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pemungutan dan keberatan.

4. Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain

a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi dana perimbangan non PBB dan lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1) Seksi Dana Pembangunan

Membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja seksi dana perimbangan serta mendistribusikan kepihak-pihak terkait.

2) Membantu kepala bidang untuk menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Melakukan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang pajak bumi dan bangunan.
- b. Menyiapkan perumusan dan koordinasi pajak bumi dan bangunan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi.
 - 1) Seksi pendapatan dan pendataan
 - a) Melakukan pendaftaran, pendataan, penilaian dan pemetaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan.
 - b) Memimpin pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan pemetaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan.
 - 2) Seksi penilaian dan pendapatan
 - a) Menetapkan besarnya nilai pajak bumi dan bangunan, menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP, dan blanko lain yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan pajak bumi bangunan.
 - b) Memimpin pelaksanaan penetapan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP, dan blanko lain yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan pajak bumi bangunan.
 - 3) Surat penagihan dan laporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melakukan penagihan, penyetoran, penyuluhan, penyisiran, tunggakan, membuat target pendapatan dan membuat laporan realisasi pendapatan pajak bumi bangunan.
- b) Memimpin pemungutan, penyetoran, penagihan, penyuluhan, penyisiran tunggakan, membuat target pendapatan dan membuat laporan relisasi pendapatan pajak bumi bangunan.

6. Bidang Anggaran

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset dibidang anggaran.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi perencanaan anggaran.
 - 1) Seksi perencanaan anggaran
Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi, dan koordinasi perencanaan anggaran
 - 2) Seksi anggaran penerimaan
Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi anggaran penerimaan.
 - 3) Seksi anggaran pengeluaran
Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi anggaran pengeluaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bidang Pembendaharaan

- a. Melakukan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang pembendaharaan.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pembendaharaan.
- c. Menyiapkan perumusan koordinasi verifikasi.
 - 1) Seksi Pembendaharaan Pengeluaran
Membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan evaluasi dan koordinasi perbendaharaan serta membantu kepala bidang dalam penatausahaan transaksi penerbitan SP2D kedalam registrasi.
 - 2) Seksi Pengelolaan Kas Daerah
Membantu kepala bidang dalam mengusahakan, mengatur dana, menyimpan uang daerah, dan memantau pelaksanaan penerimaan dana pengeluaran APBD.

8. Bidang Pengelolaan Aset

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi penilaian inventarisasi dan penghapusan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi penilaian dan optimalisasi.
 - 1) Seksi Inventarisasi Aset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan koordinasi inventarisasi.

2) Seksi Penilaian dan Penghapusan

Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penilaian dan penghapusan.

3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Melaksanakan pengadaan barang milik daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap baran milik daerah.

9. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang akuntansi dan pelaporan.

b. Menyiapkan bahan perumusan dalam pengelolaan dana dan statistik.

c. Menyiapkan bahan penyusuna evaluasi dan pelaporan dinas.

1) Seksi pembukuan dan akuntansi

Menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi keuangan daerah dalam arti mengidentifikasi, mencatat dan membukukan transaksi keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan melalui serangkaian prosedur akuntansi dan perangkat yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan daerah dalam suatu sistem akuntansi keuangan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Seksi Pengelola Keuangan Daerah

Melakukan kajian mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan dan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan autitabel.

